

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2005-2019

Fendy Parengkuan¹, Vecky A. J Masinambow², Audie O. Niode³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : fendyparengkuan@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang tidak luput dari masalah pendapatan asli daerah. Berbicara masalah pendapatan asli daerah, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Selain dana alokasi umum, Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan Pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Panjang Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan dana alokasi umum, pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum; Panjang Jalan; Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

North Sulawesi Province is one of the provinces in Indonesia that does not escape the problem of regional original income. Talking about regional original revenue, of course we will focus on two main aspects, namely taxes and levies, although there are still other aspects of official revenue that are included in regional original revenue. However, in practice, it turns out that there are problems experienced by the regions in the context of increasing regional original income caused by various factors. Therefore, local governments are required to optimize their revenues to increase their own regional income which will later be used to finance regional expenditures and expenditures. In addition to the general allocation fund, one of the efforts to increase regional revenues is by optimizing the potential in road infrastructure development. The purpose of the study was to determine the effect of the general allocation fund and road infrastructure development on regional original income in North Sulawesi province. The type of research used is descriptive quantitative. The data used is secondary data obtained from the BPS of North Sulawesi province. The research was conducted using multiple regression analysis. The results of the study indicate that the general allocation fund partially has a positive and significant effect on regional original revenue. Road length partially has a negative and insignificant effect on regional original revenue. simultaneously the general allocation fund, road infrastructure development has an effect on regional original income.

Keywords : General Allocation Fund; Road Length; Local Revenue

1. PENDAHULUAN

Negara merupakan lembaga (organisasi) kemasyarakatan dengan wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dengan didukung oleh warganya guna mencapai tujuan tertentu (Illahi & Alia, 1998). Salah satu kebijakan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam

perekonomian Indonesia adalah membuat RAPBN dan menetapkan sebagai APBN, dimana APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR (UU No.33 tahun 2004).

Pemerintah Negara memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan, pertahanan dan keamanan, keadilan, pekerjaan umum, perekonomian dan sebagainya untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warganya, begitu juga dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah provinsi untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam penerimaan pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan salah satu cara pemerintah yang harus kita sambut dengan positif. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

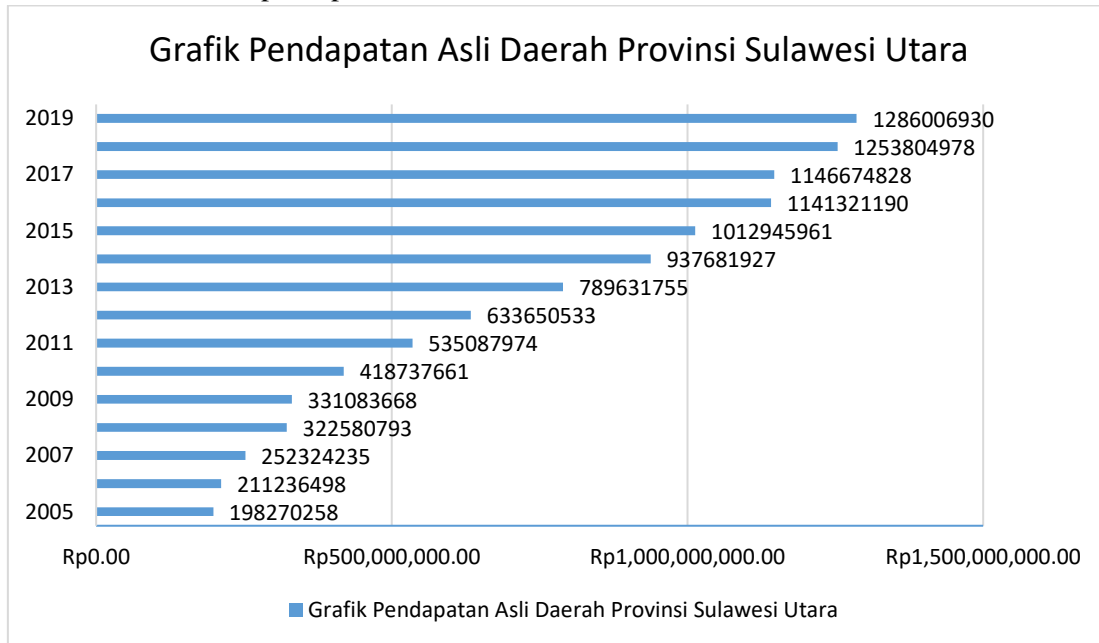
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik, salah satunya dengan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berbicara masalah PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana itu sendiri maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya.

Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan untuk pemerintah daerah atau kota agar mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Berikut ini disajikan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara selama periode 2005-2019 dalam satuan Rupiah (Rp) :

Grafik 1. pendapatan asli daerah



Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2022

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata. Keterkaitan pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh antara dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dikelola oleh Negara yang sumbernya dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk mensejahterakan. Sesuai dengan hak dan kewajiban daerah yang diberikan oleh UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah memperbolehkan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah sendiri, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan sumber- sumber pendapatan yang lainnya yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa : hak dan kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud diatas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Dana Alokasi Umum

Pengertian Transfer Dana dan Alokasi Umum (DAU) Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (*revenue sharing*). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Adapun Tujuan dari transfer adalah sebagai penutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan kemampuan fiskal antara daerah untuk daerah sehingga dana alokasi umum setiap daerahnya tidak pernah sama besarnya (Susanti, 2016).

2.3 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara (Nursini, Zamhuri, Tawakkal, & Amrullah, 2008). Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Nursini, 2010).

2.4 Pembangunan

Pengertian pembangunan dapat dirumuskan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hubungan antara perencanaan dan pembangunan sangat kompleks. Kompleksitas dapat dilihat dari teori-teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, incremental, advokasi, radikal, dan transaktif. Sementara kompleksitas pembangunan dapat dilihat dari perluasan makna/konsep pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan mulai dari paradigm modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan dan endogen. Karena kompleksitas perencanaan pembangunan maka perlu manajemen perencanaan pembangunan.

2.5 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan dan juga terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi, membaiknya distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 1998). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Saragih & Khadafi, 2003).

2.6 Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi & Bachtiar (2002) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi, bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi serta agar para investor mau menambahkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Infrastruktur di definisikan sebagai

fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.7 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu zona pasar lainnya, kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung - kampung).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Lengkong, Saerang, & Alexander (2013) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode regresi sederhana yang dibantu oleh uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD ternyata belum mampu untuk menunjang Belanja Modal karena masih terlalu minim penerimaan daerah. Saran penelitian ini pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mengembangkan lagi potensi dari wilayah Sulawesi Utara untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari daerah.

Penelitian yang dilakukan Khalistyowati (2010) mengenai analisis korelasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah. Hasil penelitian menerangkan bahwa penelitian dilakukan selama tiga tahun dari 2007 hingga 2009 hubungan secara keseluruhan selama tiga tahun menunjukkan pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah sangat rendah yaitu sebesar 0,048%.

Penelitian yang dilakukan Steivi (2014) menganalisis desentralisasi fiskal pasca otonomi daerah. Dalam penelitian ditunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota Manado masih berada di kisaran 12 % atau kurang selama periode pelaksanaan otonomi daerah, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan akan pendanaan dari pemerintah pusat masih amat besar, untuk itu perlu ada tindakan segera dari pemerintah daerah Kota Manado memacu sumber-sumber ekonomi produktifnya serta mencari sumber-sumber perekonomian lain yang dapat meningkatkan PAD sehingga dapat memangkas ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan Eko (2019) menganalisis *fiscal decentralization and routine conflict in indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan sangat penting dalam menjelaskan desentralisasi fiskal - hubungan konflik rutin. Selain itu, ketergantungan fiskal dan keleluasaan fiskal berkorelasi negatif dan signifikan dengan kejadian konflik rutin dan kematian akibat konflik rutin. Namun, hasil kualitatif menunjukkan bahwa fenomena elite capture terjadi di setiap tingkat pemerintahan.

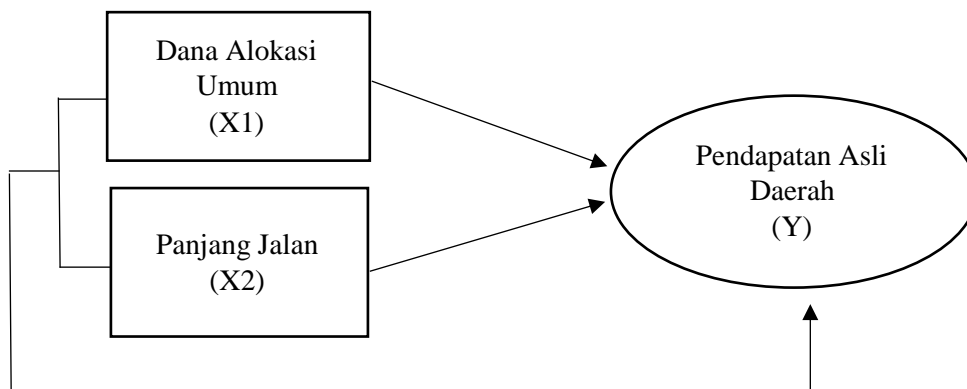
Penelitian yang dilakukan Shinta (2012) menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas akses pendidikan dasar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki dampak yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan Pupung (2011) menganalisis desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat kemandirian pemerintah daerah adalah masih rendah yang artinya ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Beberapa area bahkan menunjukkan untuk pendapatan daerah tidak mampu untuk membiayai pengeluaran rutin.

Penelitian yang dilakukan Hadi (2019) menganalisis *fiscal decentralization and regional economic growth*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten / kota di Jawa Tengah. Temuan lainnya, pribadi investasi dan jumlah tenaga kerja mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan temuan, untuk mengurangi kesenjangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya pengembangan kegiatan ekonomi berbasis komoditas di daerahnya.

Kerangka pikir konseptual

Gambar 1. Kerangka pikir konseptual



1. Diduga dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Diduga pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3. Diduga dana alokasi umum dan pembangunan infrastruktur jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis Penelitian kuantitatif merupakan serangkaian observasi (pengukur) yang dapat dinyatakan dalam angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Jenis Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sarana perantara (dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder sering disajikan dalam bentuk bukti, catatan sejarah, atau laporan yang disusun dari publikasi

atau arsip yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungandari data time series yaitu time series yaitu runtut waktu tahun 2005-2019.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan analisis regresi *time series* Menggunakan software *EViews* dan *Microsoft Excel*.

$$\text{Ln PAD}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln DAU}_t + \beta_2 \text{Ln PJ}_t + e_t$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

DAU = Dana Alokasi Umum.

PJ = Panjang Jalan.

Ln = Log natural.

β_0 = Nilai konstanta

$\beta (1,2)$ = Koefisien regresi berganda.

t = 1,2,3, ,10 (Time Series 2005-2019)

e = Parameter pengganggu

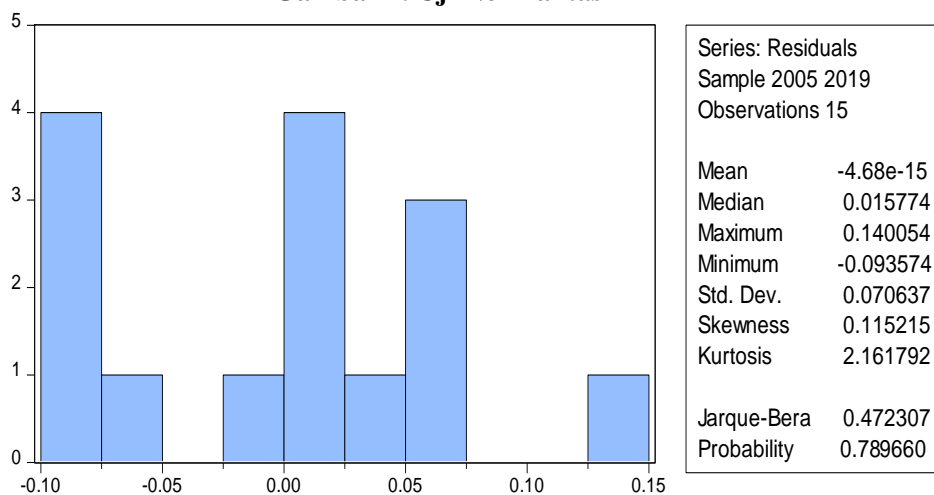
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal baik variabel dependen maupun independen. Untuk mengambil keputusan, kita melihat pada *jarque-Bera* dan *probability* penelitian ekonomi dan bisnis pada umumnya menggunakan $\alpha = 0.05$ (5%), jika *probability* < α , maka data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji di atas dapat di lihat bahwa nilai *probability jarque berra* sebesar $0,789660 > 0,05$ artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

Gambar 2. Uji Normalitas



Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas tersebut memiliki masalah multikolinearitas (gejala multikolinearitas). Korelasi berganda adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang muncul dalam hubungan antar variabel bebas. Dari hasil uji di atas dapat dilihat pada tabel *centered Variance Inflation Factor (VIF)*, nilai VIF untuk variabel DAU dan Panjang Jalan adalah dibawah dari 10. Hal ini menunjukkan probabilitas <10, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Sample: 2005 2019
Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.593985	9260.894	NA
LOG_DAU	0.012244	2481.538	1.485920
LOG_PJ	0.458312	13365.75	1.485920

Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai prob nya <0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob >0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode white, nilai prob nya sebesar $0,0131 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	13.48728	Prob. F(4,10)	0.0005
Obs*R-squared	12.65439	Prob. Chi-Square(4)	0.0131
Scaled explained SS	4.704564	Prob. Chi-Square(4)	0.3190

Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada regresi linier terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu (*disturbance term*) dalam periode & kesalahan pengganggu dalam periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi hubungan maka hal tadi memperlihatkan adanya persoalan autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation Lagrange-Multiplier (LM) Test*. Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob $0,9439 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.038786	Prob. F(2,10)	0.9621
Obs*R-squared	0.115462	Prob. Chi-Square(2)	0.9439

Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

REGRESI LINEAR BERGANDA

Uji regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independent (X1,X2,...Xn) dengan variabel dependent (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independent dengan variabel dependent apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependent apabila nilai dari variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Tabel 4. Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: LOG_PAD				
Method: Least Squares				
Sample: 2005 2019				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.548898	1.895781	-0.289537	0.7771
LOG_DAU	1.339220	0.110654	12.10281	0.0000
LOG_PJ	-0.762286	0.676987	-1.125997	0.2822
R-squared	0.942413	Mean dependent var		8.760278
Adjusted R-squared	0.932815	S.D. dependent var		0.294354
S.E. of regression	0.076297	Akaike info criterion		-2.131511
Sum squared resid	0.069855	Schwarz criterion		-1.989901
Log likelihood	18.98633	Hannan-Quinn criter.		-2.133019
F-statistic	98.18951	Durbin-Watson stat		1.549704
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Kajian Teori (Diolah Penulis)

Uji Hipotesis

Uji t (t-test) adalah pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian ini di lakukan untuk mengetahui signifikasi peranan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial dengan mengasumsikan variabel konstan adalah variabel independen. Uji t/parsial memiliki kriteria, apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak begitu sebaliknya H0 diterima. Dengan rumus $dk = n - 2$ dan $\alpha = 0,05$. Dengan nilai signifikasi > 0,05 maka H0 ditolak dan begitu sebaliknya H0 diterima. Yang berarti menunjukkan bahwa hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan.

UJI t-statistik terhadap variabel dana alokasi umum memperoleh hasil t Hitung > t Tabel (12.10281 > 1.761). Berdasarkan Hasil Uji Di Atas Maka Dapat Dilihat Bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

UJI t-statistik terhadap variabel panjang jalan memperoleh hasil t Hitung $>$ t Tabel ($-1.125997 <$ 1.761). Berdasarkan Hasil Uji Di Atas Maka Dapat Dilihat Bahwa panjang jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F memiliki kriteria pengujian, apabila F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan jika sebaliknya H_0 diterima, dengan $dk = n-2$ dan nilai signifikansi $0,05$ apabila $sig <$ $0,05$ maka H_0 ditolak, begitu jugasebaliknya H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. UJI t-statistik terhadap variabel panjang jalan memperoleh F Hitung $>$ F Tabel ($98.18951 >$ $4,67$). Berdasarkan hasil uji di atas maka dapat dilihat bahwa dana alokasi umum dan panjang jalan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.2 Pembahasan

Hubungan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel DAU (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap PAD di provinsi sulawesi utara. Berdasarkan penelitian yang di lakukan RM, R., & Mulyani (2015) menerangkan bahwa PAD nyatanya belum mampu membiayai APBD yang didalamnya harus di tutupi DAU. Hal ini berarti bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung dengan tingginya DAU akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, Kemandirian daerah sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin tinggi sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah tersebut akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa bantuan muatan kepentingan pemerintah pusat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Hubungan panjang jalan dan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel panjang jalan (X_2) memiliki pengaruh negatif terhadap PAD di provinsi sulawesi utara. Berdasarkan penelitian yang di lakukan Utama M. (2018) menerangkan bahwa Hal ini dikarenakan pada jangka pendek pembangunan infrastruktur jalan khususnya di daerah pedesaan belum dirasakan oleh masyarakat sebab masih minimnya jalan maupun kurangnya akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian daerah.

Hubungan dana alokasi umum, pembangunan infrastruktur jalan dan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil regresi, variabel DAU dan Panjang Jalan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD di provinsi sulawesi utara. Dana Alokasi Umum yang di transfer dari pusat ke daerah, nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan akan membuka akses jalan contohnya akses jalan dari desa ke kota maupun dari kota ke desa ataupun akses jalan ke tempat-tempat wisata di daerah Sulawesi Utara.

5. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Variabel panjang jalan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Variabel dana alokasi umum dan panjang jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Clara, R. D., & Mulyani, H. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 3, No 1.
- DJPK KemenKeu. (1999). *Kementorerian keuangan*. Diambil kembali dari DJPK: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=341>
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Vol 13 No 1 <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.25>.
- Effendi, & Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta, Uhaindo dan Offset.
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol 17, No 2.
- Illahi, B. K., & Alia, M. (1998). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Jurnal BPK*, Volume 3 Nomor 2.
- JDIH BPK RI. (2004). *JDH BPK RI Data base peraturan*. Diambil kembali dari JDH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- JDIH BPK RI. (2014). *JDIH BPK RI Data Base Peraturan* . Diambil kembali dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Khalistyowati. (2010). *analisis korelasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah*. Kabupaten Pemalang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Lengkong, J., Saerang, D. P., & Alexander, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 8 No 3.
- Lombogia, S. A., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2014). Analisis Desentralisasi Fiskal Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 No 1.
- Nursini. (2010). *Modeling Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. From Indonesia One Search: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3883>
- Nursini, Zamhuri, M., Tawakkal, & Amrullah. (2008). Desain Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Efektifitas Pengeluaran dan Pelayanan Publik Kab. Sidrap. *Bulletin Penelitian UNHAS Seri: Sosial Budaya dan Humaniora*, Vol 7 Edisi Khusus: 53-62.
- Realisasi pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulawesi Utara*. (2021, Juli). From <https://sulut.bps.go.id>

- Saragih, J. P., & Khadafi, M. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi daerah*. Ghalia Indonesia.
- Sasana, H. (2019). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. *Economics Development Analysis Journal*, Vol 8 No 1 <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.29879>.
- Sugiyanto, E., Digdowiseiso, K., & Zulmasyhur. (2019). Fiskal decentralization and routine conflict in indonesia. *Journal of Applied Economic Science*, XIII (4 (58)). ISSN 2393-5162, Vol XIII (4 (58)). ISSN 2393-5162.
- Susanti, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 1.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Utama, M. B. (2018). *Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya*. From Universitas Islam Indonesia: <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9801>